

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
MELALUI PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH)**

Ayumila Kurnia, Sa'diyaturrachma Insani,

Universitas Muhammadiyah Lampung, PPs IAIN Raden Intan Lampung

Email: ayumilak@gmail.com

Abstract

Government programs have an important role in community empowerment. There are several government programs engaged in community empowerment, one of which is the KOTAKU Program. This program is one of the strategic efforts of the Directorate General of Human Settlements in accelerating the handling of slum settlements. This study aims to describe the community empowerment process in the Kotaku Program in Sumber Agung Village, Kemiling Bandar Lampung. This type of research is descriptive qualitative by collecting data obtained from observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the Kotaku Program in increasing community empowerment has had a positive impact, this can be seen from the activities of small and medium enterprises (UKM) in the community which are running as well as improving the quality of life and the principles used in its application are in accordance with the principles of sharia economics. such as justice, equity, freedom and security and the absence of interest in providing business capital assistance to the community. It can be concluded that running this community empowerment program is not instantaneous, but it is necessary to monitor and evaluate periodically to ensure the accuracy of quality and activity targets, as well as quality human resources (HR), so that it can help accelerate the handling of slums and improve the economy. Public.

Keywords: Government Programs, Community Empowerment, Islamic Economics

Abstrak

Program Pemerintah memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa program pemerintah yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat, salah satu diantaranya yaitu Program KOTAKU. Program ini merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan pemukiman kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat dalam Program Kotaku yang ada di Desa Sumber Agung, Kemiling Bandar Lampung. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Kotaku dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat sudah memberikan dampak positif, hal ini bisa terlihat dari kegiatan usaha kecil menengah (UKM) masyarakat yang berjalan serta peningkatan kualitas hidup dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penerapannya sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, pemerataan, kebebasan dan keamanan serta tidak adanya bunga dalam pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat ini tidaklah instan, namun perlu adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, serta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh serta peningkatan ekonomi masyarakat.

Kata kunci : Program Pemerintah, Pemberdayaan masyarakat, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu alternative untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pemberdayaan yang dapat dilakukan yaitu pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Pada tanggal 27 April 2016 pemerintah Indonesia meluncurkan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) . Tujuan utama dari program ini yaitu peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, kawasan dan kabupaten/kota. Sebelum adanya program ini, ada juga yang bernama P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan), lalu diubah menjadi PNPM Mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Dan sekarang diperbaharui menjadi program KOTAKU. Program Ini ditujukan untuk desa-desa di Indonesia agar bisa lebih maju di dalam tingkat terkecil yaitu desa dengan melakukan pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi Diharapkan dengan adanya program ini bisa memajukan Indonesia dengan bermula dari hal yang kecil.

Program ini direalisasikan di desa-desa yang tersebar di wilayah Indonesia, salah satunya yaitu pada Desa Sumber Agung Kemiling Kota Bandar Lampung. Desa Sumber Agung kecamatan Kemiling kota Bandar Lampung adalah salah satu desa yang diberikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui program KOTAKU. Program ini dijalankan oleh BKM yaitu Badan Keswadaya Masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk secara sukarela menjalankan program ini agar mengatur membuat program-program untuk memajukan desa dan mensejahterakan warga desa melalui program-programnya. BKM terbentuk dengan 9 orang dan salah satu menjadi koordinator, BKM ini tidak dilepas begitu saja karena ada fasilitator dari tingkat kota untuk memberikan masukan, arahan kepada para BKM dalam merencanakan, mengatur dan melaksanakan program-program.

Sumber Agung merupakan satu contoh dari program KOTAKU yang ada, desa-desa di Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa jika diarahkan dengan tepat dan terarah. Perlunya kebijakan dari pemerintah untuk melakukan hal itu, masih banyak desa-desa yang mempunyai potensi luar biasa akan tetapi dengan banyaknya kendala dan keterbatasan rakyat pedesaan terutama di pedalaman selalu terjerat dengan kemiskinan dan potensi yang ada di pedesaan tidak bisa dirasakan bersama.

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberikan pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individu-sosial, jasmani-rohani, duniawi- ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Di dalam ekonomi Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari (sebab syariah Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu). (Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, 2012:4)

Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Al-Qur'an memaklumkan visi negara dalam bidang ekonomi ini :

Artinya : "Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya". (QS. At-Tahaa (20) : 118-119)

Dalam kaitan ini, Imam *Al-Ghazali* menguraikan tanggungjawab sosial ekonomi negara :

”Tanggungjawab penguasa adalah membantu rakyat ketika mereka menghadapi kelangkaan pangan, kelaparan dan penderitaan, khususnya ketika terjadi kekeringan atau ketika harga tinggi sampai rakyat mendapat penghasilan kembali, karena dalam keadaan tersebut sulit bagi mereka memenuhi dua tujuan tersebut. Dalam kondisi tersebut negara harus memberi makanan kepada rakyat dan memberikan bantuan keuangan kepada mereka dari kekayaan negara supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka”.

Pedesaan yang identik dengan masyarakat yang berada pada garis kemiskinan dengan ekonomi lemah, padahal Allah telah menyediakan sumber dayanya di dalam alam raya ini untuk mewujudkan kehidupan ekonomi manusia dan agar dimanfaatkan oleh manusia. (Mustafa Edwin Nasution, dkk ,2007:2)

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 29 :

Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”

Masyarakat pedesaan yang kebanyakan tinggal pada suatu daerah dekat pegunungan yang mempunyai sumber daya alam yang banyak. Akan tetapi terkadang kendalanya adalah tidak mempunyai modal atau dana dan juga keterbatasan pengetahuan. Dengan adanya program PNPM ini yang masuk kedalam desa-desa memberikan dana dibentuk KSM yang diberikan pengarahan oleh fasilitator sehingga menciptakan program-program yang diharapkan dapat mencapai tujuan untuk pembangunan pada tingkat desa.

Para fuqaha sepakat bahwa kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syariah. Pandangan ini dalam lapangan ekonomi,

meniscayakan kesejahteraan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua sumber utama kesulitan dan ketidaknyamanan dan meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material. Ia juga meniscayakan penciptaan suatu lingkungan ekonomi di mana khalifah Allah mampu memanfaatkan waktu dan kemampuan fisik atau mentalnya bagi pengayaannya diri, keluarga dan kemampuan fisik atau mentalnya bagi pengayaan diri, keluarga, dan masyarakatnya.(M. Umer Chapra, 2000:3)

Ketika desa maju maka akan juga berpengaruh kepada kota karena hubungan yang saling tergantung antara desa dan kota. Desa sebagai *supplier* bahan-bahan atau kebutuhan sehari-hari seperti hasil pertanian, perikanan atau perternakan.(Nasikun, 1986:17). Desa yang identik dengan perkumpulan orang-orang miskin, kemiskinan adalah masalah utama dalam pembangunan nasional karena itu pembangunan di desa harus dikembangkan.

Kehidupan sosial penuh dengan berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan kecuali dengan dana dan terutama pada masalah kemiskinan. Kemiskinan pada sistem globalisasi ini bukan sekedar melihat pada pemenuhan kebutuhan seperti makan dan pakaian, akan tetapi biaya yang cukup untuk menuntut ilmu. Karna pendidikan pada globalisasi ini merupakan kebutuhan.

Pemecahan masalah ekonomi ini dalam pandangan Islam merupakan tanggung jawab pemimpin kaum muslimin adalah pemerintah.(Said Hawwa, 2004:582). Masyarakat Islam adalah masyarakat subur, terhormat dan lebih baik dari kaum lainnya. Karena sesungguhnya Islam mempunyai banyak sumber ekonomi dari

zakat, infaq, shadaqah, pajak sumber pendapatan umum dari sumber daya alam yang dikelola pemerintah dari rakyat dan kemudian disalurkan lagi kepada rakyat.

Kebahagiaan akan mudah dicapai dengan penerapan perekonomian yang mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu. Islam menegaskan untuk para penguasa, agar meminimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan kesejahteraan. Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Diharapkan dengan adanya program-program dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dapat berdampak positif bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat luas, tentunya dengan langkah-langkah yang termenejemen dengan baik.

PEMBAHASAN

Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. (KBBI, 2002:242). Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan ini diarahkan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mereka mendapatkan *income* atau penghasilan dari kegiatan usahanya.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional. (Daniel Sukalele, 2014)

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat tentunya terdapat konsep-konsep di dalamnya, konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut: (Sumodiningrat, 1999)

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi:
 - a. Pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya;
 - b. Penguatan kelembagaan
 - c. Penguasaan teknologi
 - d. Pemberdayaan sumberdaya manusia.

4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

5. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah:

- a. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal)
- b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker
- c. Pelayanan pendidikan dan kesehatan
- d. Penguatan industri kecil
- e. Mendorong munculnya wirausaha baru
- f. Pemerataan spasial

6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup:

- a. Peningkatan akses bantuan modal usaha
- b. Peningkatan akses pengembangan SDM
- c. Peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah

Syariat Islam merupakan ajaran yang komprehensif, mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya mengatur tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan perspektif syariah itu bertujuan untuk mencapai keseimbangan *duniawi* dan *ukhrawi*. Maka dari itu perlu adanya pemberdayaan ekonomi yang berdasarkan pada paradigma Islam .

Kualitas pemberdayaan ekonomi masyarakat ini bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, baik dari pengelolanya, badan pengawas, relawan dan

masyarakatnya sendiri. Perlu adanya suasana dan lingkungan yang kondusif yang didasarkan pada pilar-pilar Islami, diantaranya adalah sebagai berikut: (Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, 2006:403)

1. Kesalehan Umat

Sesungguhnya kesalehan umat adalah dengan mengimani Islam sebagai akidah dan syariah, dan pengaplikasiannya dalam segala aspek kehidupan. Sebab ketika seorang muslim meyakini bahwa dia sebagai khalifah dalam kehidupan ini, yang salah satu peraturannya adalah memakmurkan bumi dan mengembangkannya, maka keyakinannya ini akan mendorongnya dalam melakukan pengembangan ekonomi dengan menilainya sebagai sarana yang harus dimiliki umat dalam melaksanakan tugasnya di dalam kehidupan ini. Bahkan jika dilakukannya dengan ikhlas, maka akan menjadi ibadah yang mendekatkan muslim kepada Allah swt.

2. Kebaikkan Sistem Pemerintah

Adapun dimaksudkan sistem pemerintah adalah perangkat politik dan apa yang muncul darinya terkait sistem pemerintah. Sebab dengan kadar kebaikan perangkat politik, konsistensi pemahaman politik bagi individu, dan kebaikan hubungan antara rakyat dan pemerintah, maka akan meletakkan laju pesatnya pengembangan ekonomi pada jalan yang semestinya. Urgensi kebaikan sistem pemerintah bersumber pada kesadaran individu umat yang merasakan bahwa disana terdapat lembaga yang memberikan hak-haknya, menentukan kewajiban dan konsekuensi untuknya, dan memberikan peluang kepadanya dalam kehidupan. Dan itulah yang akan mewujudkan keamanan dan ketentraman, dan kepatuhan pada aturan dan ketetapan (pemerintah). Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa tugas terpenting pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga agama, yaitu dengan cara menerapkan hukum-hukumnya, menyerukan kepadanya, dan berjihad melawan musuh-musuhnya.

- b. Menjaga harta kaum muslimin, yaitu dengan cara mengumpulkan dan membagikannya sesuai hukum syariah.
- c. Menegakkan keadilan dengan cara merealisasikan keamanan dan ketentraman.
- d. Berupaya mewujudkan kesejahteraan umat dengan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan dan berupaya merealisasikan kecukupan mereka.

3. Keadilan

Pengembangan ekonomi tidak akan berjalan dalam lingkungan yang diliputi kezaliman; karena kezaliman merupakan sebab hilangnya nikmat dan datangnya adzab; kemudian bahwa umat yang kehilangan keadilan maka akan kehilangan keadilan untuk bekerja sama dalam pengembangan. Umar *Radiyahallahu Anhu* menjelaskan dampak kezaliman terhadap kehidupan dengan mengatakan, "Tertahannya hujan disebabkan hakim yang jahat dan pemimpin yang zalim".

4. Kebebasan dan Persamaan

Pembicaraan tentang kebebasan dan persamaan bukanlah hanya sebatas teori dan konsep belaka, namun pembicaraan tentang hal yang dinamis, menyentuh relung kehidupan individu dan kelompok, serta berdampak pada perjalanan umat dalam kemajuan atau ketertinggalannya. Pembicaraan tentang kebebasan dan persamaan dalam Islam sangat berbeda dengan yang terdapat dalam sistem konvensional. Dalam Islam, persamaan merupakan substansi keadilan, persamaan merupakan buah dari keadilan dan salah satu fenomenanya. Sebab keadilan mengharuskan persamaan diantara manusia dalam segala bidang, seperti disebutkan dalam firman Allah,

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia

diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu.” (Al-Hujurat: 13)

5. Keamanan dan Ketentraman

Alquran mensejajarkan antara nikmat kemakmuran dan nikmat keamanan dan ketentraman. Allah berfirman,

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (Quraisy: 3-4)

Para pengamat dalam era kontemporer mengetahui hubungan antara keamanan dan pengembangan ekonomi, dimana mereka mengaitkan konsep pengembangan ekonomi dengan keamanan, hingga dikatakan, “Keamanan adalah pengembangan ekonomi. Tanpa pengembangan ekonomi, maka disana tidak mungkin ada keamanan. Karena itu negara-negara berkembang yang “tertinggal” yang tidak merealisasikan pengembangan ekonomi tidak merasakan adanya jaminan

Program-Program KOTAKU

Program KOTAKU merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pendampingan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Program ini dilaksanakan di 34 provinsi, yang

tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program KOTAKU adalah seluas 23.656 hektar

Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, KOTAKU akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.

Tahapan pelaksanaan KOTAKU meliputi tahapan pendataan, dimana lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM), sudah melakukan pendataan kondisi awal (*baseline*) 7 indikator kumuh di desa/kelurahan masing-masing. 7 Indikator tersebut yaitu berikut ini:

1. Bangunan Gedung

- a. Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi dan bentuk
- b. kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang
- c. ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan bahan bangunan

2. Jalan Lingkungan

- a. Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman
- b. Lebar jalan yang tidak memadai
- c. Kelengkapan jalan yang tidak memadai

3. Penyediaan Air Minum

- a. Ketidaktersediaan akses air minum
- b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu
- c. Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan

4. Drainase Lingkungan

- a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan
- b. Menimbulkan bau
- c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan

5. Pengelolaan Air Limbah

- a. Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah
- b. Ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku
- c. Tercemarnya lingkungan sekitar

6. Pengelolaan Persampahan

- a. Ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan
- b. Ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- c. Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah

7. Ruang Terbuka Publik

- a. Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH)
- b. Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka non hijau/ruang terbuka publik (RTP)

Setelah itu, disusun dokumen perencanaan yang terintegrasi antara dokumen perencanaan masyarakat dengan dokumen perencanaan kabupaten/kota. Hasil perencanaan ini menentukan kegiatan prioritas untuk mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru, yang akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota.

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk

pemerintah daerah dan masyarakat akan dilakukan bersama tahapan kegiatan. Termasuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman.

Sumber pembiayaan KOTAKU berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (World Bank), Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank. Selain itu juga kontribusi pemerintah daerah, melalui APBD maupun swadaya masyarakat, akan menjadi satu kesatuan pembiayaan guna mencapai target peningkatan kualitas kumuh yang diharapkan. Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Sebenarnya, program ini dilaksanakan untuk membentuk dan menumbuhkan swadaya masyarakat mengenai pembangunan desa dan kesejahteraan sosial. Yang dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat desa, lalu dibentuklah para relawan-relawan yang siap membangun desa secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Dari relawan yang ada dibentuklah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang anggotanya dibatasi dan terdapat satu koordinator. Fungsi utama BKM ini sendiri adalah untuk menggerakkan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Anggaran yang diterima untuk segala yang dibutuhkan atau disebut dengan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) diturunkan dalam beberapa tahap, tidak turun sekaligus. Tahap pertama 20%, tahap kedua 50% dan tahap ketiga 30%. Ada tiga hal utama yang dilakukan dalam KOTAKU ini yaitu bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.

1. Untuk bidang ekonomi, terdapat pemberian pinjaman tanpa bunga untuk masyarakat yang memiliki usaha kecil.

2. Dalam bidang sosial, ini lebih kepada pemberian pelatihan pelatihan kepada masyarakat agar memiliki keahlian seperti pelatihan menjahit, atau lain sebagainya, ini juga disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan desa tersebut.
3. Yang terakhir adalah lingkungan, ini adalah pembetulan sarana dan prasarana di desa, seperti pembangunan jalan kecil, irigasi, ketersediaan air bersih, MCK, ketersediaan tempat sampah, penerangan umum, jembatan dan lain sebagainya.

Setiap desa diberikan fasilitator yang berguna untuk memberi pengarahan agar tujuan program tercapai dan masyarakat bisa mempercayakan program-program yang dilakukan kepada BKM nya. Laporan keuangannya pun diaudit oleh auditor independen dari Pemerintah Daerah yang sudah ditunjuk. Program ini menumbuhkan kepedulian sesama masyarakat, untuk saling bekerjasama dalam membangun desanya. (Kompasiana, 2015)

KOTAKU salah satu penyaluran dana kepada rakyat merupakan program yang membangun sistem, proses dan prosedur serta wadah bagi pemberdayaan masyarakat. Dengan tujuan meningkatkan kehidupan ekonomi. Pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan disebutkan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Adapun rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan Program KOTAKU melalui komponen program sebagai berikut:

1. Pengembangan Masyarakat. Komponen Pengembangan Masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.
2. Bantuan Langsung Masyarakat. Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.
3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal. Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal atau kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.
4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program. Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.

Dampak Program KOTAKU

Program dalam bidang ekonomi ini berdampak sangat positif bagi pemberdayaan masyarakat desa Sumber Agung, Kemiling Bandar Lampung. Kini mereka mempunyai kegiatan usaha dari pemberian modal pinjaman oleh pemerintah untuk dikelola dan dikembangkan dengan fasilitas dan pengawasan yang cukup memadai. Masyarakat setempat juga diberikan pelatihan dan sosialisasi tentang kewirausahaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program KOTAKU sudah memberikan dampak yang positif bagi pemberdayaan masyarakat Desa Sumber Agung, Kemiling Bandar Lampung. Hal ini bisa terlihat dari kegiatan usaha kecil menengah (UKM) masyarakat yang berjalan serta peningkatan kualitas hidup dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penerapannya sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, pemerataan, kebebasan dan keamanan serta tidak adanya bunga dalam pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat. Yang perlu diketahui bersama bahwa dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat ini tidaklah instan, namun perlu adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, serta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh serta peningkatan ekonomi masyarakat.

Daftar Pustaka

al-Ashpahani, Ar-Raghib. *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Juz I, Maktabah Nazar al-Musthafa al-Baz

Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.

Depag RI, *Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Jalur Agama*, Jakarta : 1996.

- Hawwa, Said. *Al-Islam*, Jakarta : Gema Insani, 2004.
- J. Nasikun, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta : Andi Offset, 1986.
- Kartono, Kartini. *Pngantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1996.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Wajdi, Farid. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Nasution, Edwin, Mustafa dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Soetrisno, Loekman. *Kemiskinan Perempuan, Pemberdayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Surachmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar-Dasar Metode dan Teknik*, Bandung : Tarsito Rimbunan, 2005
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Balai Pustaka, 1999.